

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai keuangan entitas perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk memberikan gambaran kinerja perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan tersebut adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang mempunyai manfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (SAK,2009).

Pemerintah pusat dan daerah harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan maupun perencanaan yang berkaitan dengan anggaran keuangan melalui sistem transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan Pemerintah mempunyai kuasa serta pemegang penuh kendali sumber-sumber yang signifikan, penggunaan sumber-sumber tersebut sangat berdampak luas terhadap kesejahteraan rakyat, ekonomi rakyat, dan terdapat pemisahan fungsi antara manajemen dan pemilik sumber-sumber tersebut (Partono, 2000 dalam Nurillah 2014).

Oleh karena itu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah pusat maupun daerah harus disajikan dengan wajar tanpa adanya informasi menyesatkan. Apabila informasi keuangan tersebut mengandung unsur

yang menyesatkan akan membuat pihak yang berkepentingan salah dalam memahami laporan keuangan tersebut, untuk itu dalam memudahkan pembaca memahami laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus mengikuti standar akuntansi pemerintah yang sudah ditetapkan. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 yang menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga mampu memenuhi tujuannya, dimana karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi : keandalan, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Primayana dkk, 2014).

Setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan mendapat penilaian opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang akan diberikan BPK dalam pelaporan keuangan yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Laporan keuangan diperiksa untuk mengetahui apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai standar yang ditetapkan dan laporan keuangan yang diperiksa untuk membuktikan apakah laporan keuangan tersebut sudah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas.

Tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang ditandai dengan adanya temuan permasalahan yang terjadi di LKPP, permasalahan tersebut merupakan

gabungan ketidaksesuaian standar akuntansi pemerintah, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dan daerah selalu berupaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan opini yang baik. Ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPP maupun LKPD ini berarti laporan keuangan tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sehingga laporan keuangan yang berkualitas sangat perlu untuk diciptakan, baik dan buruknya laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Hal pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia (Rosanti dkk, 2014). Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang aparatur mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Latar belakang SDM merupakan faktor yang akan mempengaruhi dalam pengerjaan tingkat kualitas laporan keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas lulusan SMA belum sepenuhnya menguasai ataupun masih minimnya pengetahuan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, tentunya hal mengenai kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dikatakan bisa menyebabkan dampak pada sebuah laporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Andini dan Yusrawati (2015), Sudiarianti (2015), dan Afrianti (2011). Menurut Andini dan Yusrawati (2015) kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, menurut Sudiarianti (2015) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan terakhir menurut Afrianti (2011) memberikan kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi (Nurillah, 2014). Berdasarkan PP N0.56 Tahun 2005 yang berisi tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pemerintah pusat dan daerah sangat bertanggungjawab terhadap perkembangan teknologi dan informasi dalam peningkatan akses pengelolaan informasi keuangan daerah serta penyaluran informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan daerah (IKD) kepada masyarakat atau publik. Tentunya dengan teknologi dan informasi akan mampu membantu pegawai dalam menemukan adanya temuan-temuan yang menyimpang.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Roshanti dkk (2014) dan Afrianti (2011). Menurut Roshanti dkk (2104) yang memberikan kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan menurut penelitian

Afrianti (2011) memberikan kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern SPI (Roshanti dkk, 2104). Sistem Pengendalian Intern akan membantu rencana organisasi serta membantu untuk menjaga aset entitas, meneliti keamanan dan kejujuran data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terciptanya kepatuhan terhadap hukum. Dalam menunjang adanya perbaikan dalam pengelolaan pemerintah daerah serta dukungan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel maka diperlukannya sistem pengendalian intern (Nune, dalam Matana 2014). Apabila sistem pengendalian internal suatu instansi lemah ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan berupa kecurangan (*Fraud*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mengenai kelemahan sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan daerah Semester II tahun 2016, BPK menemukan adanya temuan mengenai lemahnya sistem pengendalian intern di Pemerintah Daerah dengan jumlah permasalahan sebesar 121 permasalahan dengan presentase 100% yang bermula pada Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan (54,55%), Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (33,88%), dan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern (11,57%). Tentunya permasalahan ini mengenai lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di pemerintahan Pusat ataupun Daerah yang kemudian hari menyebabkan buruknya kualitas laporan keuangan itu sendiri.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Roshanti dkk (2014) dan Sudiarianti (2105). Menurut Roshanti dkk (2104) memberikan hasil kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan menurut penelitian Sudiarianti (2011) memberikan kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Pemerintah (Nugraheni dan Subaweh, 2008). Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai peran sebagai pengatur penyajian laporan keuangan dalam peningkatan laporan keuangan. Penerapan SAP mewajibkan entitas pelapor, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah menyampaikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan selama periode bersangkutan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Baik maupun buruknya sebuah laporan keuangan tidak akan terlepas dari penerapan SAP yang dijalankan dengan tertib.

Berdasarkan hasil temuan dari BPK terhadap laporan keuangan daerah masih adanya ketidakpatuhan yang terjadi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), ketidakpatuhan pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2015 menunjukkan ada sebanyak 135 jumlah permasalahan dengan persentase 100% yang terdiri dari kerugian daerah (29,57%), potensi

kerugian daerah (46,31%), kekurangan penerimaan dan administrasi (24,12%). Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan laporan yang tidak sesuai dengan SAP yang telah dibuktikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan (IHPS) Semester II Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan informasi bahwa buruknya kualitas laporan keuangan yang terjadi pada pemerintah pusat maupun daerah pada umumnya disebabkan karena tidakpatuhnya terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhi dan Suhardjo (2013) dan Fikri (2015). Menurut Adhi dan Suhardjo (2013) yang memberikan kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan menurut penelitian Fikri (2015) memberikan kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari penelitian sebelum-sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda sehingga penelitian ini untuk menguji kembali apakah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan Kota Palangkaraya. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Roshanti,

dkk (2014), adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada tahun dan tempat penelitian serta penambahan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.2. Rumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yaitu adalah untuk menggambarkan kondisi suatu pemerintahan dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mewujudkan sistem transparansi dan akuntabilitas keuangannya. Tujuan dari setiap pemerintah adalah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas

Kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompetensi sumber daya manusia (Roshandi dkk, 2014; Primayana dkk, 2014; dan Sudiarianti, 2015), pemanfaatan teknologi informasi (Nurillah, 2014; Nazir dan Oktari, 2012; dan Diani 2014), sistem pengendalian intern (Armando, 2013; Afrianti, 201, dan Primayana, 2014), dan penerapan standar akuntansi pemerintah (Nugraheni dan Subaweh, 2008; Andini dan Yusrawati, 2015; dan Adhi dan Suhardjo, 2013).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan mengenai hubungan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Membuktikan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
2. Membuktikan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
3. Membuktikan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
4. Membuktikan penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut.

1. Bagi Praktisi

Menjadi sumber informasi dan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya mengenai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah.